

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah pusat membentuk daerah otonomi baru sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan cepat di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dalam kesejahteraan masyarakat dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Agar inisiatif ini berhasil, diperlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan kelancaran proses pembangunan di daerah-daerah baru tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia<sup>1</sup>. Pengertian perencanaan menurut Garth N. Jone adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan. Menurut W.H Newman, perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

<sup>2</sup> Suwarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 1992, hlm 126

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses awal yang dilakukan. Proses ini melibatkan penentuan serangkaian tindakan dan pemilihan opsi terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Minangkabau, istilah "Nagari" digunakan sebagai padanan kata "Desa". Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 6 ayat (2), yang memungkinkan penggunaan istilah lokal untuk menyebut Desa atau Desa Adat. Nagari di Minangkabau bisa diibaratkan sebagai negara kecil dengan struktur pemerintahan sendiri, yang disebut Pemerintah Nagari. Tugas utama Pemerintah Nagari adalah mengelola berbagai urusan internal, termasuk masalah adat yang sangat penting dalam budaya Minangkabau.

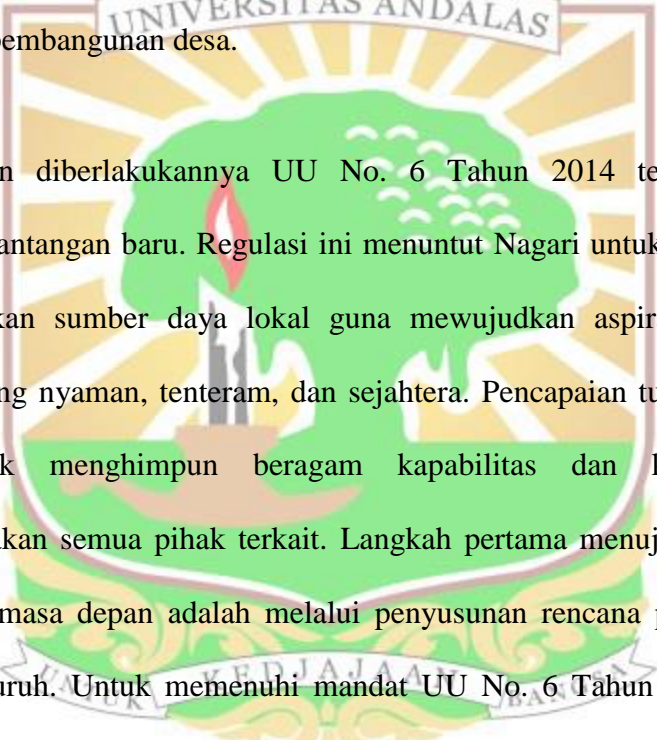
Dalam pembangunan desa, terdapat tantangan mendasar yang perlu diatasi yaitu<sup>3</sup>:

1. Desa dan area pedesaan kekurangan peta visual yang komprehensif mengenai sumber daya mereka. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap data spasial. Akibatnya, rencana pembangunan desa, baik jangka menengah maupun tahunan, serta program bantuan, sering tidak selaras dengan kebutuhan nyata dan tata ruang desa.

---

<sup>3</sup> Monografi Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

2. Permasalahan batas wilayah dan ketidakakuratan pengukuran luas desa di Indonesia masih belum terselesaikan, yang mengakibatkan munculnya berbagai konflik, baik antar desa maupun dengan pihak lain.
3. Kurangnya alat yang efektif untuk menilai kapasitas desa membuat mereka rentan terhadap eksploitasi ekonomi dari luar.
4. Belum adanya mekanisme yang memadai untuk merencanakan dan mengawasi proses pembangunan desa.



Dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari menghadapi tantangan baru. Regulasi ini menuntut Nagari untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya lokal guna mewujudkan aspirasi masyarakat akan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan sejahtera. Pencapaian tujuan ini memerlukan Nagari untuk menghimpun beragam kapabilitas dan kepentingan dengan mengikutsertakan semua pihak terkait. Langkah pertama menuju realisasi visi, misi, dan cita-cita masa depan adalah melalui penyusunan rencana pembangunan Nagari yang menyeluruh. Untuk memenuhi mandat UU No. 6 Tahun 2014 dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin desa, diperlukan terobosan baru. Inovasi ini diharapkan dapat memicu transformasi fundamental dalam pengembangan desa dan wilayah pedesaan secara keseluruhan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Nagari Panampuang di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, telah mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini memperkenalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dalam tiga aspek utama: pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat Nagari. Sistem ini dirancang untuk mendukung perencanaan pembangunan Nagari yang berkualitas tinggi. Hal ini dicapai melalui penggunaan data yang memiliki karakteristik berikut: Akurat dan terkini, Terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, Mudah diakses dan dibagikan, Dikelola dengan cermat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui implementasi sistem ini, diharapkan Nagari Panampuang dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan perencanaan pembangunannya, perlu dilakukan tata kelola data yang diproduksi dan direproduksi secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan data Nagari presisi. Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon mengatakan bahwa, perlu dilakukan tata kelola data yang diproduksi dan direproduksi secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan data Nagari presisi. Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon mengatakan bahwa:

“Setiap rencana pembangunan wajib didasarkan pada hasil penelitian yang akurat, mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Data yang digunakan harus presisi, bukan sekadar angka tanpa makna atau informasi yang tidak terverifikasi. Keakuratan dan ketepatan data sangat penting untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi suatu daerah. Penggunaan data yang tidak akurat dapat dianggap sebagai manipulasi statistik yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Perlu diingat bahwa di balik setiap angka dan data terdapat kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,

menggunakan data palsu sama saja dengan membahayakan kesejahteraan warga”.<sup>5</sup>

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa Nagari Panampuang berperan aktif dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif. Fondasi utama keberhasilan pembangunan terletak pada ketersediaan data yang tepat dan terpercaya. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan harus berlandaskan pada pendataan yang akurat. Penggunaan data yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Sebaliknya, upaya peningkatan dan pengelolaan kualitas data secara konsisten akan berdampak positif pada berbagai aspek pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadikan Nagari Panampuang memiliki basis data yang akurat, Inovasi Data Desa Presisi hadir sebagai solusi efektif. Pendekatan ini memungkinkan desa mengatasi kendala dalam merancang pembangunan yang tepat guna dan sasaran. Nagari Berbasis Data Presisi juga memberdayakan Nagari untuk mengembangkan dan mengelola data mereka sendiri secara mandiri, dengan hasil yang akurat, mutakhir, dan sesuai konteks lokal. Inisiatif ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, Data Desa Presisi tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat nagari antara

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam.

Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

Fakultas Ekologi dan Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB), Pitaloka Foundation, dan Pusat kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) sebagai civitas akademika yang mendampingi nagari dalam menyelenggarakan Data Desa Presisi.

Program Nagari Berbasis Data Presisi berawal dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan ini menuntut Nagari untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya lokal guna mewujudkan aspirasi masyarakat akan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan sejahtera. Pencapaian tujuan ini memerlukan Nagari untuk menghimpun beragam kapabilitas dan kepentingan dengan mengikutsertakan semua pihak terkait. Langkah pertama menuju realisasi visi, misi, dan cita-cita masa depan adalah melalui penyusunan rencana pembangunan Nagari yang menyeluruh. Program Nagari Berbasis Data Presisi memiliki empat tujuan utama yaitu:

1. Membangun fondasi data untuk mendukung seluruh siklus pembangunan Nagari, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
2. Menyediakan data yang memenuhi standar kualitas tinggi: akurat, terkini, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini juga dirancang agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari.
3. Meningkatkan transparansi informasi dengan menyediakan data yang komprehensif, akuntabel, dan terbuka untuk publik.

4. Mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan Nagari yang lebih baik melalui pemanfaatan data presisi.

Sedangkan Sasaran dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi adalah pengolahan data dan melakukan pemetaan, diantaranya: (1) jumlah penduduk, (2) pendidikan dan kebudayaan, (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, (4) perlindungan hukum, kehidupan sosial dan HAM, (5) infrastruktur dan lingkungan hidup<sup>6</sup>. Disamping itu, Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon mengatakan bahwa:

“waktu itu kami melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kami masih mengandalkan metode manual untuk menghasilkan data, yang mengakibatkan tingkat akurasi yang kurang memadai. Namun, dengan terjalannya kolaborasi ini, kami memiliki peluang untuk mewujudkan aspirasi kami dalam mengembangkan data nagari yang lebih akurat dan tepat. Kerjasama ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya kami meningkatkan kualitas dan presisi data nagari, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perencanaan pembangunan di masa mendatang”<sup>7</sup>.

Dalam perencanaan program Nagari Berbasis Data Presisi, Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam bersama dengan civitas akademika, dalam proses membangun data presisi dilakukan dengan pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data nagari presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital

---

<sup>6</sup> Monografi Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Tahun 2023

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

dan partisipasi. Dalam perencanaan program Nagari Berbasis Data Presisi, Nagari Panampuang selalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nagari Berbasis Data Presisi. Seperti yang dijelaskan oleh Wali Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, sebagai berikut:

“proses langkah awal yaitu melakukan pengkajian data dilapangan, pengambilan dokumen-dokumen foto merekam dan mengkaji bagian sejarah Nagari Panampuang dan membentuk sumber daya dengan melakukan pedataan kerumah-rumah masyarakat yang dilakukan oleh kader yang ditunjuk oleh pihak nagari.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas, mengungkapkan bahwa tahap pertama dalam perencanaan program Nagari Berbasis Data Presisi adalah identifikasi sumber daya yang diperlukan. Dalam hal ini, Nagari mengambil inisiatif dengan melakukan penunjukan langsung terhadap pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam rangka Pelaksanaan Program Nagari Berbasis Data Presisi tentu memiliki stuktur yang telah di tetapkan. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Tahun 2023.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30-11.00 WIB



**Tabel 1.1 Susunan Tim Petugas Pendataan Nagari Berbasis Data Presisi  
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENDATAAN
1.	ETRIWARMON S.PD	Wali Nagari Panampuang	Penanggung jawab
2.	Zahrul Zahman. SH	Sekretaris Nagari	Sekretaris
3.	Weni Aliza A.md	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Syahril . SH.	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5.	Betty Nawir S.pd	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Oke Saputra	Kaur Perencanaan	Anggota
7.	H. Sofyan. S.pd	Ketua Bamus	Anggota

Sumber: Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penanggung jawab dari tim pendataan Nagari Berbasis data presisi di Nagari Panampuang adalah Wali Nagari Panampuang. Sekretaris yang membantu nagari dalam melakukan pendataan Nagari Berbasis Data Presisi. Kasi pelayanan, Kasi kesejahteraan, Kasi pemerintahan, kaur perencanaan adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh Sekretaris Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan Nagari Berbasis Data Presisi. Bamus yang melakukan pedampingan dalam pelaksanaan program Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang.

Pada tim pendataan Nagari Berbasis data presisi di Nagari Panampuang adalah Wali Nagari Panampuang selaku penanggung jawab dalam pendataan Nagari Berbasis Data Presisi bertugas menghimpun dan menganalisis Data Nagari berbasis Data Presisi yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Nagari Panampuang. Kepemimpinan dari Wali Nagari Panampuang ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kasi pemerintahan Nagari Panampuang, sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya, gaya kepemimpinan wali nagari patut diapresiasi. Beliau menunjukkan sikap yang sangat transparan dan kooperatif dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang muncul selama proses pendataan Nagari Berbasis Data Presisi. Aspek koordinasi juga terus terjaga dengan baik hingga saat ini, mengingat perannya yang vital dalam implementasi program Nagari Berbasis Data Presisi. Keterbukaan dan kemampuan berkoordinasi

yang ditunjukkan oleh wali nagari ini menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran dan keberhasilan program tersebut.”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diatas, terungkap bahwa implementasi program Nagari Berbasis Data Presisi ditandai oleh kepemimpinan yang efektif. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek kunci, adanya Koordinasi yang solid antar pihak terkait, Komunikasi yang lancar dan efektif, Pengarahan yang jelas dari pimpinan Sehingga faktor-faktor ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang sejalan dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan program Nagari Berbasis Data Presisi, Nagari Panampuang melakukan strategi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wali Nagari Panampuang dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan oleh oleh pihak nagari yaitu harus komitmen. Komitmen untuk menjadikan data presisi sebagai acuan dan itu harus harus di update setiap tahun, yang dilakukan saat akan melakukan perencanaan pembangunan dan seminimal mungkin 6 tahun, jadi dikarenakan nagari berbasis data presisi masih baru dilakukan, maka belum adanya update terbaru terkait data. Jadi jika programnya ada dalam RPJM, maka program nagari berbasis data presisi bisa dimasukkan rencana kerja pemerintah (RKP), begitu pula sebaliknya”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam. Pada 20/05/2024 pada pukul 10.05 WIB

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

Peraturan Nagari tentang Data Desa Presisi dapat diterapkan di seluruh nagari di wilayah Kabupaten Agam. Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pendataan yang lebih akurat dan terstandar di tingkat nagari se-Kabupaten Agam. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten, dengan berlandaskan pada data yang lebih presisi dan terpercaya, seperti yang telah disampaikan oleh Bupati Agam, Andri Warman sebagai berikut :

“Pihak berwenang menekankan tekadnya untuk memperluas penerapan Peraturan Nagari ini ke seluruh nagari di Kabupaten Agam. Mereka mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas keberhasilan Nagari Panampuang dalam menerapkan sistem pendataan presisi. Keberhasilan ini semakin bermakna karena didukung oleh kontribusi putra-putri terbaik Sumatera Barat yang saat ini menduduki posisi penting di pemerintahan pusat. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara inisiatif lokal dan dukungan dari tokoh-tokoh daerah yang berpengaruh di tingkat nasional dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di tingkat nagari”<sup>11</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut, Harmonisasi peraturan perundang-undangan atas draf Perna (Peraturan Nagari) tentang Nagari Berbasis Data Presisi ini. Peraturan inovasi Nagari Berbasis Data Presisi juga disampaikan Direktur Pusako Unand, Charles Simabura sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/606181/peraturan-nagari-panampuang-berbasisdata-presisi-diluncurkan>

“Dengan ditetapkannya Peraturan Nagari ini, dipandang bahwa nagari kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghasilkan data yang tepat, mutakhir, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Peraturan ini menjadi dasar yuridis bagi nagari dalam upaya mengumpulkan dan mengelola informasi yang mencerminkan kondisi aktual, kebutuhan nyata, serta potensi yang dimiliki oleh nagari. Dengan demikian, nagari dapat mengembangkan basis data yang tidak hanya akurat dan terkini, tetapi juga relevan dengan konteks lokal, yang pada gilirannya akan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif”.<sup>12</sup>

Berdasarkan kutipan pada hasil wawancara diatas, proses penyelarasan regulasi terkait rancangan Peraturan Nagari (Perna) mengenai Nagari Berbasis Data Presisi telah menghasilkan suatu kerangka hukum yang kokoh. Kerangka ini memberikan dasar *legal* bagi nagari untuk menciptakan dan mengelola data yang tidak hanya akurat dan terkini, tetapi juga selaras dengan situasi nyata di lapangan. Dengan adanya landasan yuridis ini, nagari memiliki wewenang untuk mengembangkan sistem pendataan yang mencerminkan kebutuhan aktual dan potensi riil yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif di tingkat nagari.

“Pada tahun 2023, Sumatera Barat mengambil langkah inisiatif dengan meluncurkan program Nagari Berbasis Data Presisi. Nagari Panampuang dipilih sebagai *pilot project* untuk implementasi program ini.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Nagari Berbasis Data Presisi

Untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan sinergi dan kerjasama yang erat antar semua pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang efektif, aspirasi untuk menghasilkan data yang akurat dari tingkat Nagari, Desa, hingga Kelurahan dapat direalisasikan. Ketersediaan data yang berkualitas ini akan memungkinkan pengukuran kemajuan pembangunan secara lebih tepat dan terukur. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan berbasis data yang komprehensif ini menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.

Data Presisi adalah data aktual dan akurat tentang Nagari yang mengintegrasikan data spasial dan data numerik sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penyajian informasi tidak lagi bergantung pada dugaan belaka, tetapi telah ditopang oleh sistem pendataan berbasis teknologi. Implementasi Nagari Berbasis Data Presisi yang akurat sangat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Ketersediaan data yang tepat dan terpercaya memungkinkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan berjalan lebih efisien. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan

---

<sup>14</sup> Ibid.

alokasi sumber daya. Diharapkan, pendekatan yang berlandaskan data ini dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Adapun petunjuk teknis Nagari Berbasis Data Presisi sebagai berikut:

- 1) Status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan.
- 2) Data dasar keluarga sebagai Data Spasial dan Data Numerik, minimal terdiri atas data identitas responden dan keluarga serta tanggungan.
- 3) Data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri dari data tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga perbulan dan pertahun secara rinci, mata pencaharian, kepemilikan aset secara rinci, status kepemilikan lahan milik, sewa, atau garap, sumber keuangan warga, data sandang, pangan, dan papan masyarakat, data pendidikan masyarakat, data kebudayaan daerah dan desa, data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, data kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan data infrastruktur dan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Panampuang

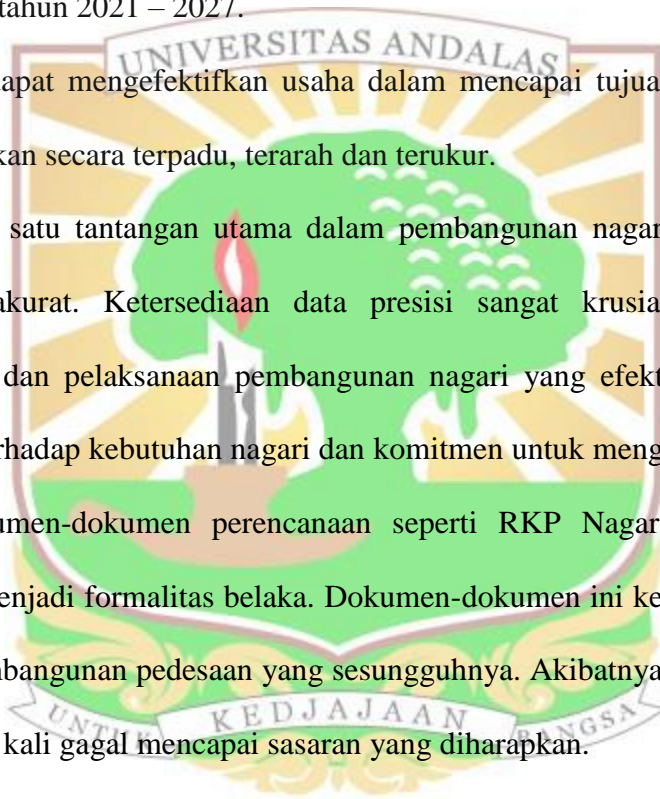
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam bertujuan sebagai berikut<sup>15</sup>:

---

<sup>15</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten agam

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penentuan prioritas program kegiatan tahunan.
2. Sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan pembangunan nagari.
3. Menggambarkan kondisi umum nagari sekaligus memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi nagari dalam kurun waktu tahun 2021 – 2027.
4. Agar dapat mengefektifkan usaha dalam mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan terukur.

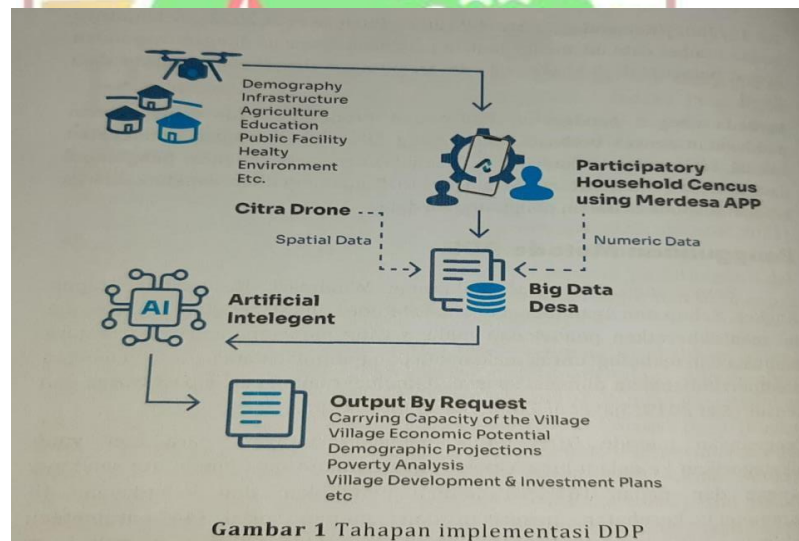
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan nagari adalah keterbatasan data yang akurat. Ketersediaan data presisi sangat krusial untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari yang efektif. Tanpa identifikasi yang tepat terhadap kebutuhan nagari dan komitmen untuk mengembangkan data yang presisi, dokumen-dokumen perencanaan seperti RKP Nagari dan RPJM Nagari cenderung menjadi formalitas belaka. Dokumen-dokumen ini kehilangan relevansinya terhadap pembangunan pedesaan yang sesungguhnya. Akibatnya, upaya pembangunan nagari sering kali gagal mencapai sasaran yang diharapkan.





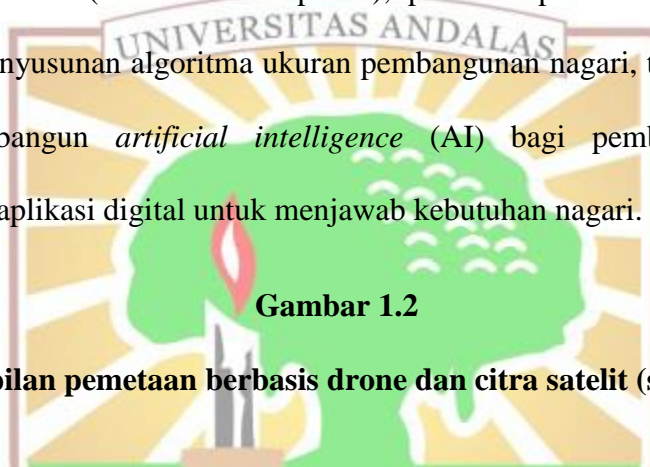
Nagari Berbasis Data Presisi dibutuhkan sebagai data dasar dalam perencanaan di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi adalah pengolahan data dan melakukan pemetaan, diantaranya: (1) jumlah penduduk, (2) pendidikan dan kebudayaan, (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, (4) perlindungan hukum, kehidupan sosial dan HAM, (5) infrastuktur dan lingkungan hidup.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Impelentasi Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang**



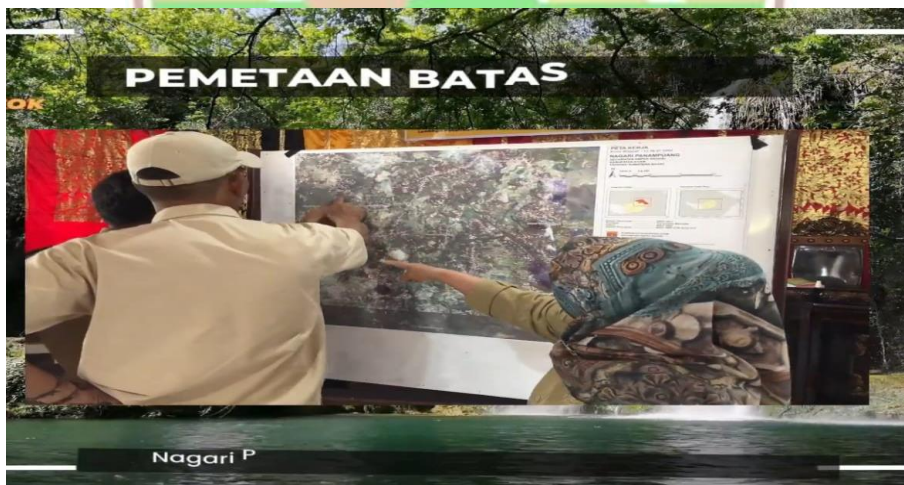
Sumber: Nagari Panampuang, 2024

Untuk mengimplementasikan metode Nagari Data Presisi, dilakukan melalui tahapan: (1) Memproduksi citra resolusi tinggi, instrumen yang dilakukan pada tahap ini adalah teknologi *drone* untuk menghasilkan citra resolusi tinggi (2) melakukan sensus rumah tangga berbasis partisipatif, keterlibatan pemuda nagari sangat penting, pemuda nagari dilatih untuk menggunakan instrumen aplikasi merdesa sensus, (3) Penyimpanan data (numerik dan spasial), pada tahap ini data dihimpun kedalam server, (4) penyusunan algoritma ukuran pembangunan nagari, tahap ini diorientasikan dalam membangun *artificial intelligence* (AI) bagi pembangunan nagari (5) Membangun aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan nagari.



**Gambar 1.2**

**Tampilan pemetaan berbasis drone dan citra satelit (spasial)**



Sumber: Nagari Panampuang, 2024

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Proses pendataan spasial diawali dengan persiapan menyeluruh untuk pemetaan menggunakan drone dan citra satelit secara partisipatif. Tahap persiapan ini meliputi:

1. Peninjauan ulang dokumen-dokumen laporan terkait
2. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk survei lapangan
3. Identifikasi lanskap atau satuan lahan yang akan dipetakan

Tujuan dari penyusunan survei dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang wilayah yang diteliti. Hal ini dicapai melalui pengumpulan data yang relevan, yang nantinya akan membantu dalam analisis ketika melakukan survei di lapangan.

**Gambar 1.3**

**Tampilan Merdesa Sensus Aplikasi Nagari Berbasis Data Presisi**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa dalam program Nagari Berbasis Data Presisi, sensus dilaksanakan menggunakan aplikasi merdesa. Kader program ini mengunjungi setiap rumah tangga di jorong masing-masing untuk mengumpulkan data. Mereka menggunakan smartphone Android yang telah diinstal aplikasi merdesa sensus<sup>16</sup>.

Proses sensus mencakup pengumpulan informasi rinci, meliputi:

1. Status bangunan
2. Identitas responden
3. Kepemilikan lahan
4. Partisipasi dalam kegiatan nagari
5. Latar belakang etnis
6. Pola konsumsi
7. Pekerjaan utama dan sampingan
8. Demografi rumah tangga (jumlah anggota, usia, jumlah KK)
9. Riwayat kesehatan dan akses asuransi
10. Kondisi sanitasi dan tempat tinggal
11. Pola makan dan sumber energi untuk memasak
12. Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari

---

<sup>16</sup> Monografi Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

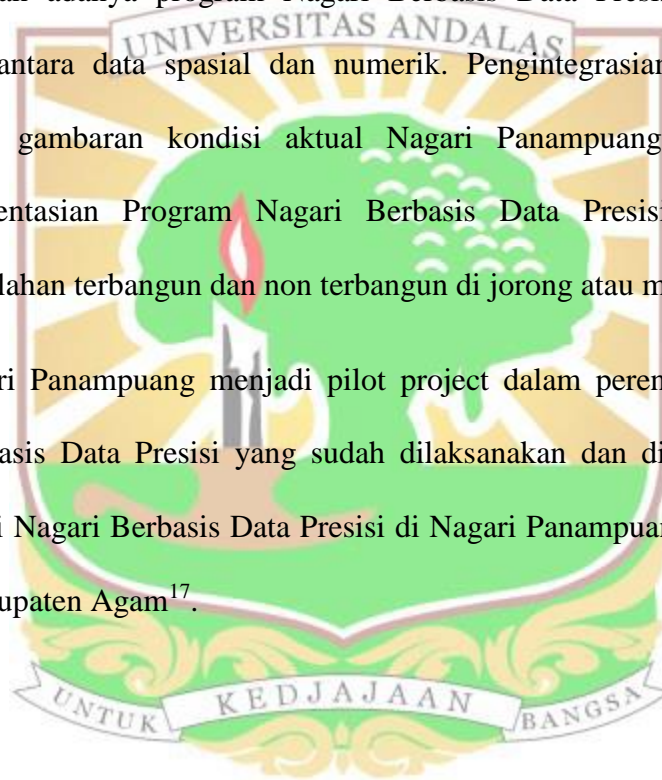
13. Aktivitas pertanian dan non-pertanian

14. Rata-rata pengeluaran rumah tangga

Aplikasi ini juga secara otomatis mencatat koordinat geografis setiap rumah yang dikunjungi.

Dengan adanya program Nagari Berbasis Data Presisi menghasilkan data terintegrasi antara data spasial dan numerik. Pengintegrasian data tersebut dapat memberikan gambaran kondisi aktual Nagari Panampuang. Hasil analisis dan pengimplementasian Program Nagari Berbasis Data Presisi memberikan potret penggunaan lahan terbangun dan non terbangun di jorong atau masyarakat.

Nagari Panampuang menjadi pilot project dalam perencanaan pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi yang sudah dilaksanakan dan diresmikan sejak tahun 2023 sebagai Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam<sup>17</sup>.



---

<sup>17</sup> Nagari Panampuang

**Gambar 1.4**  
**Peluncuran Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang**



Sumber: Dokumentasi Nagari Panampuang, 2024

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa Nagari Panampuang diakui sebagai salah satu pelopor di Sumatera Barat, bahkan di seluruh pulau Sumatera, dalam hal penerapan sistem data presisi. Sebagai tindak lanjut dari inisiatif ini, pemerintah nagari mengintegrasikan hasil penelitian tersebut ke dalam kerangka hukum lokal. Hal ini diwujudkan melalui penetapan Peraturan Nagari (Perna) Panampuang Nomor 2 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi. Langkah ini menunjukkan komitmen Nagari Panampuang dalam mengadopsi pendekatan berbasis data yang akurat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat nagari.

Pelaksanaan Program Nagari Berbasis Data Presisi tentu memiliki stuktur yang telah di tetapkan. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Tahun 2023. Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon mengatakan bahwa:

Pendataan mencakup keseluruhan rumah dengan total 6.160 jiwa terdata. Data yang dihasilkan sangat tepat karena mengungkapkan berbagai indikator penting untuk pembangunan di masa depan. Salah satu temuan penting adalah masih tingginya angka pengangguran, yang akan menjadi fokus perhatian. Data ini menyajikan informasi statistik menyeluruh tentang penduduk, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jumlah warga, dan batas wilayah. Bahkan rincian seperti jumlah pengguna telepon genggam juga tercatat. Ini merupakan inovasi penting mengingat kebutuhan akan data akurat untuk perencanaan pembangunan<sup>18</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa satu temuan penting adalah masih tingginya angka pengangguran, yang akan menjadi fokus perhatian. Data ini menyajikan informasi statistik menyeluruh tentang penduduk, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jumlah warga, dan batas wilayah. Ini merupakan inovasi penting mengingat kebutuhan akan data akurat untuk perencanaan pembangunan.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam.

Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30-11.00 WIB

Dalam pendataan Nagari Berbasis Data Presisi salah satunya yaitu di sektor kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta kebersihan lingkungan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat. Dukungan sarana prasarana kesehatan masyarakat di Nagari Panampuang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

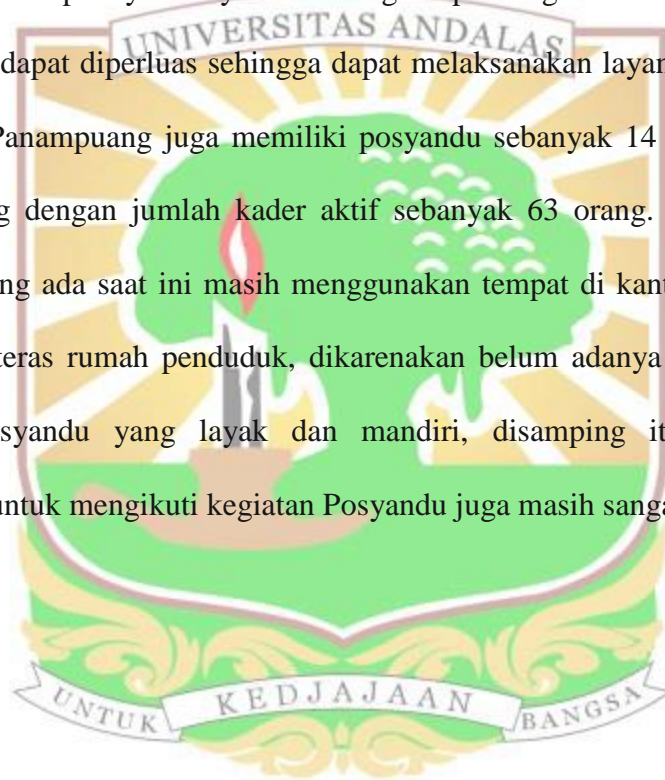
**Tabel 1.2 sarana prasarana kesehatan masyarakat di Nagari Panampuang**

No	Jorong	Jumlah					
		Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu	Dokter/ Perawat	Bidan
1.	Bonjo	-	-	1	1	-	2
2.	Sei Beringin	-	-	-	1	2	-
3.	Lurah	-	1	-	1	2	1
4.	Lundang	-	-	1	3	1	2
5.	Surau Labuah	-	-	-	1	-	2
6.	Surau Lauik	-	-	1	5	1	1
7.	Kubu	-	-	-	2	1	1

Sumber: Monografi Nagari Panampuang, 2024



Dari data diatas, dengan jumlah penduduk sebesar 7.757 Jiwa maka jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Panampuang sudah memadai walaupun kondisinya belum sempurna. Puskesmas Pembantu yang ada di Nagari Panampuang terletak di Jorong Lurah sangat membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal, maka untuk kedepannya masyarakat mengharapkan agar fasilitas sarana Pustu yang ada tersebut dapat diperluas sehingga dapat melaksanakan layanan rawat Inap. Selain itu, Nagari Panampuang juga memiliki posyandu sebanyak 14 Unit yang tersebar di setiap Jorong dengan jumlah kader aktif sebanyak 63 orang. Pelaksanaan kegiatan posyandu yang ada saat ini masih menggunakan tempat di kantor jorong dan tempat lain seperti teras rumah penduduk, dikarenakan belum adanya tempat khusus untuk kegiatan Posyandu yang layak dan mandiri, disamping itu tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posyandu juga masih sangat rendah.



**Tabel 1.3 Susunan Tim Petugas Pendataan Nagari Berbasis Data Presisi  
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENDATAAN
1.	ETRIWARMON S.PD	Wali Nagari Panampuang	Ketua
2.	Zahrul Zahman. SH	Sekretaris Nagari	Sekretaris
3.	Weni Aliza A.md	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Syahril . SH.	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5.	Betty Nawir S.pd	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Oke Saputra	Kaur Perencanaan	Anggota
7.	H. Sofyan. S.pd	Ketua Bamus	Anggota

Sumber: Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023

Dalam Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Tahun 2023 ini juga menjelaskan tugas dalam Tim Pendataan Nagari Berbasis Data Presisi Nagari Panampuang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi civitas akademika di perguruan tinggi melakukan pedampingan produsen data presisi.
- 2) Mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu perangkat nagari dan warga nagari untuk produksi dan reproduksi Data Presisi.
- 3) Mengkoordinasikan produksi dan reproduksi Data Presisi sesuai dengan prosedur dan mekanisme pendataan nagari.
- 4) Menghimpun dan menganalisis Data Nagari Berbasis Data Presisi yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Nagari Panampuang.
- 5) Memastikan pemanfaatan Data Presisi sebagai basis data Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Agam.

Selain itu juga dibentuk kader Nagari Berbasis Data Presisi pada tahun 2023 dengan sosialisasi kepada kader. Hal ini ditetapkan sesuai dengan Surat Tugas Wali Nagari Panampuang tentang Nomor: 412/ 05/ PNP/VI-2023 Tentang Penetapan Kader Nagari Berbasis Data Presisi Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Tahun 2023. Sarana prasarana kesehatan masyarakat di Nagari Panampuang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Susunan Kader Nagari Berbasis Data Presisi Tahun 2023**

No.	Nama	Jorong	Jumlah KK yang didata	Jumlah Bangunan Tidak Berpenghuni
1.	Akela Junia	Lurah	9	2
2.	Annisa Khairani	Kubu	54	14
3.	Bettiriyani	Surau Lauik	97	28
4.	Defi Indiriani	Surau Lauik	60	17
5.	Desi Susanti	Lundang	106	30
6.	Elfira	Surau Labuah	92	29
7.	Farid Asyraf Nalendra	Surau Labuah	94	29
8.	Harsya Maulana	Surau Labuah	107	44
9.	Husni	Lurah	87	35
10.	Ika Monisca Yasmin	Lundang	42	29
11.	Intan Wulandari	Kubu	70	18
12.	Lenni	Sungai Baringin	68	20
13.	Melia Sastrawati	Surau Lauik	74	22
14.	Misra Denni Hartati	Surau Lauik	62	13
15.	M. Rahmat Fadli	Surau Labuah	43	18
16.	Muharrani Purnama	Lundang	99	30
17.	Nina Fortuna Juniarti	Bonjo	88	55
18.	Nora Guspita	Surau Lauik	70	13
19.	Novianti	Sungai Baringin	68	28
20.	Popi	Surau Labuah	96	23
21.	Putri Alvionita Rahmawati	Bonjo	88	36
22.	Resi Marsela	Lurah	7	3
23.	Shinta Devirawati	Sungai Baringin	76	24
24.	Siska Dewi	Lundang	97	27
25.	Viory Eka Savitri	Kubu	82	29
26.	Yulia Asfiani	Surau Lauik	64	13
27.	Zahratul Jannah	Surau Labuah	104	20
28.	Za'im Muzhaffar	Surau Lauik	21	4
Jumlah			2025	653

Sumber: Surat Tugas Nagari Panampuang dalam Nomor: 412/ 05/ PNP/ VI-2023

Dalam Surat Tugas Nomor: 412/ 05/ PNP/ VI-2023, dijelaskan tugas kader Nagari Berbasis Presisi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan ke rumah-rumah warga Masyarakat Nagari Panampuang (*Door To Door*) serta menuangkannya pada form aplikasi yang telah disediakan.
2. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan Pimpinan dan Tim Data Presisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
3. Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pendata dan Enumerator Sosial Nagari Panampuang Tahun 2023 Bertanggung jawab kepada Walinagari melalui Tim Data Presisi Nagari Panampuang.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Wali Nagari Panampuang dari wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Pada tahun 2023 sekitar Bulan Mei Kami membentuk sekitar 30 kader dalam melakukan pendataan Nagari Berbasis Data Presisi. Setelah kami mengumpulkan kader-kader, diberikan Surat Tugas kemudian kader melaksanakan pendataan kerumah-rumah masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kader-kader harus sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan Tim Data Presisi. Dipilihnya kader-kader dikarenakan yang selalu bersinggungan dalam pelaksanaan program serta masyarakat dan jorong yang mengawasi kader dalam melakukan pendataan.”<sup>19</sup>

---

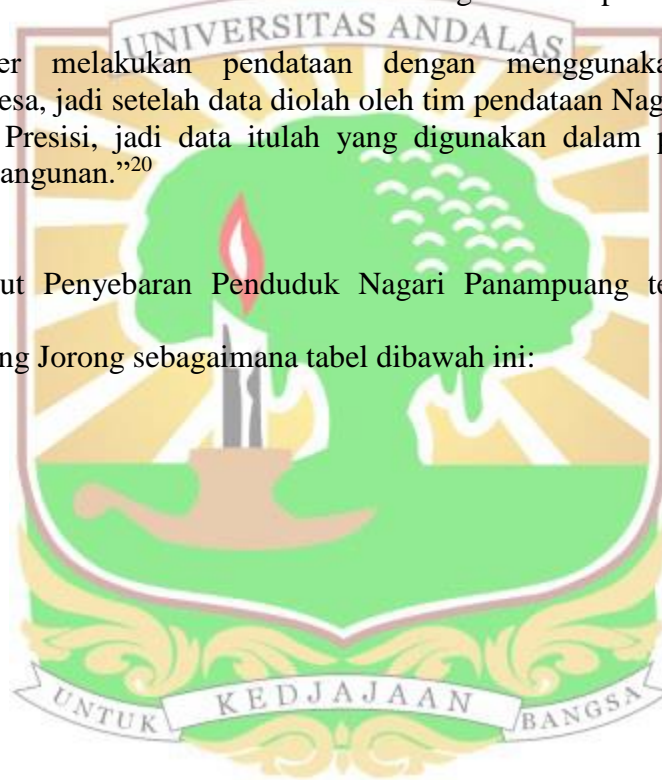
<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wali Nagari Panampuang dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan dan kelengkapan data untuk Nagari Berbasis Data Presisi memerlukan dibentuknya kader yang bertujuan Pengumpulan informasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program Nagari Berbasis Data Presisi pada tingkat jorong..

Seperti yang telah disebutkan oleh Sekretaris Nagari Panampuang, sebagai berikut:

“Kader melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Merdesa, jadi setelah data diolah oleh tim pendataan Nagari Berbasis Data Presisi, jadi data itulah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.”<sup>20</sup>

Berikut Penyebaran Penduduk Nagari Panampuang tersebar pada wilayah masing-masing Jorong sebagaimana tabel dibawah ini:



---

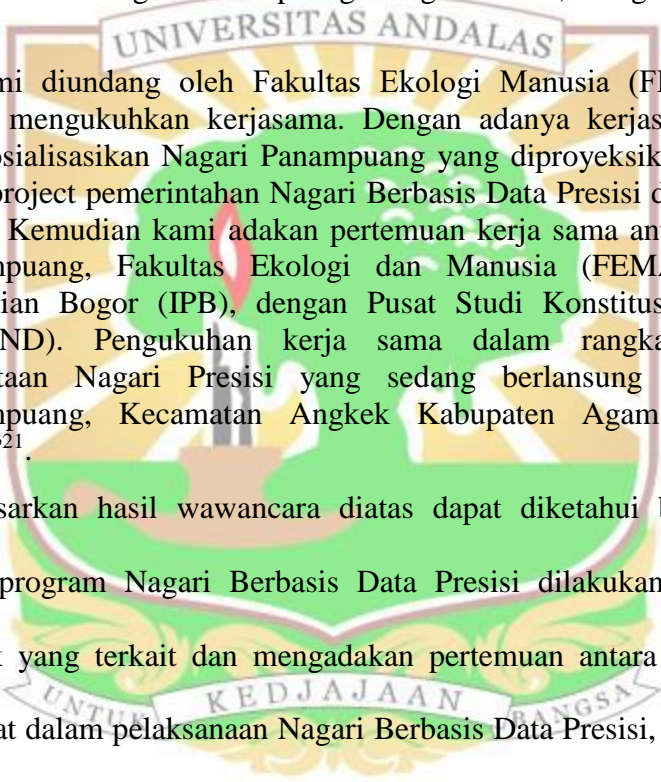
<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam. Pada 20/05/2024 pada pukul 09.41 WIB

**Tabel 1.4 Jumlah penduduk dan Jumlah Kepala keluarga Nagari  
Panampuang**

Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
	Laki-Laki	Perempuan		
Bonjo	384	397	781	228
Kubu	401	395	769	230
Lundang	633	646	1.279	390
Lurah	360	332	692	184
Sungai Baringin	410	438	848	238
Surau Labuah	646	632	1.278	378
Surau Lauik	1.038	1.013	2.051	683
<b>Jumlah</b>	3.884	3.873	7.757	2.296

Sumber: RPJM Nagari Panampuang, 2024

Dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi, Nagari Panampuang melakukan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nagari Berbasis Data Presisi diantaranya Kader Nagari Berbasis Data Presisi, *civitas akademika* yaitu Pusako Unand, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA IPB). Seperti yang dijelaskan oleh Wali Nagari Panampuang sebagai berikut, sebagai berikut:



“Kami diundang oleh Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB untuk mengukuhkan kerjasama. Dengan adanya kerjasama untuk mensosialisasikan Nagari Panampuang yang diproyeksikan menjadi pilot project pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi di Sumatera Barat. Kemudian kami adakan pertemuan kerja sama antara Nagari Panampuang, Fakultas Ekologi dan Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB), dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) (UNAND). Pengukuhan kerja sama dalam rangka kegiatan pendataan Nagari Presisi yang sedang berlangsung di Nagari Panampuang, Kecamatan Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat”<sup>21</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi dilakukan dengan kerja sama dengan pihak yang terkait dan mengadakan pertemuan antara Nagari Panampuang sebagai tempat dalam pelaksanaan Nagari Berbasis Data Presisi, Fakultas Ekologi dan Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) berperan sebagai *civitas akademika* yang membantu Nagari Panampuang dalam pengumpulan data dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand berperan sebagai melakukan pedampingan Nagari

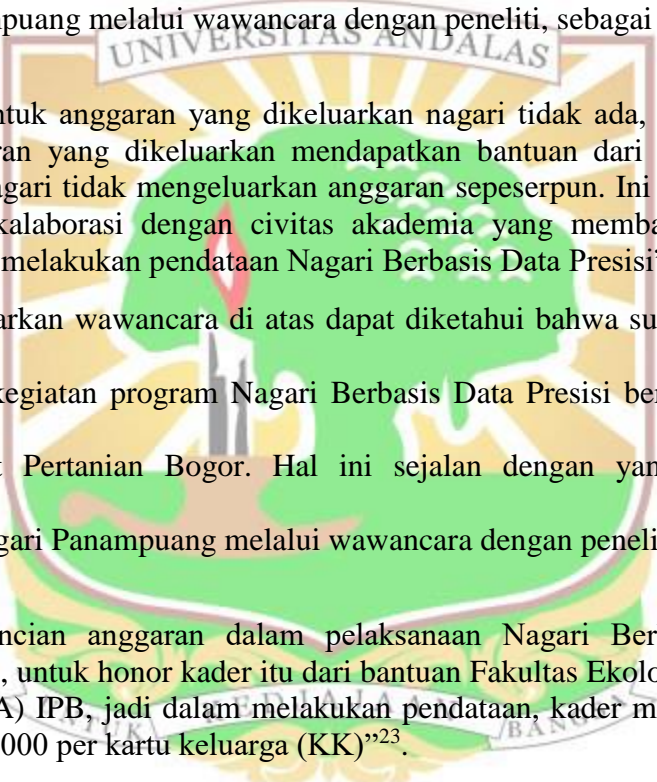
---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB.



Panampuang untuk mengontruksikan norma hukum terkait pendataan dan Data Nagari Presisi.

Selain itu, sumber anggaran juga merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu program. Adapun sumber anggaran dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi bersumber dari bantuan civitas akademika. Seperti yang dijelaskan oleh Wali Nagari Panampuang melalui wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:



“Untuk anggaran yang dikeluarkan nagari tidak ada, disebabkan anggaran yang dikeluarkan mendapatkan bantuan dari pihak IPB, jadi nagari tidak mengeluarkan anggaran sepeserpun. Ini merupakan hasil kalaborasi dengan civitas akademika yang membantu nagari dalam melakukan pendataan Nagari Berbasis Data Presisi”<sup>22</sup>.

Bedasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program Nagari Berbasis Data Presisi bersumber dari bantuan pihak Institut Pertanian Bogor. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Panampuang melalui wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

“Rincian anggaran dalam pelaksanaan Nagari Berbasis Data Presisi, untuk honor kader itu dari bantuan Fakultas Ekologi manusia (FEMA) IPB, jadi dalam melakukan pendataan, kader mendapatkan Rp 10.000 per kartu keluarga (KK)”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 20/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panampuang Kecamatan ampek Angkek Kabupaten Agam. Pada 20/05/2024 pada pukul 09.41 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pendanaan untuk program Nagari Berbasis Data Presisi berasal dari bantuan Institut Pertanian Bogor. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan suatu program, penting untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan lainnya.

Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat ditarik kesimpulan guna sebagai perbaikan. Dalam hal ini, melalui evaluasi dapat dilihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dalam hal ini, melalui evaluasi dapat dilihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi dilakukan pengawasan dan evaluasi. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari Panampuang yang mengatakan bahwa:

“Setiap kegiatan itu pasti ada evaluasi. Evaluasi dalam pelaksanaan program Berbasis Data Presisi dilakukan minimal sekali setahun dan seminimal mungkin kita lakukan sekali 6 tahun setelah launcing Nagari Berbasis Data Presisi. Dari hasil evaluasi bisa kita melihat kekurangan dari pelaksanaannya.”<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa evaluasi yang dilakukan Nagari Panampuang itu dilakukan 1 Tahun setelah launcing Nagari Berbasis Data Presisi.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

Untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi, Wali Nagari selaku penanggung jawab selalu memantau kader. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari Panampuang, sebagai berikut:

“Tidak ada, Kalau dari nagari kan ada daftar pertanyaan sensus merdesa aplikasi, karena Kita melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, jadi dapat meminimalisir dalam melakukan kesalahan, kalau adapun yang memalsukan data nanti bakalan ketahuan dikarenakan data masyarakat ada kesenjangan data, jadi masyarakat sendiri yang bakalan dirugikan, misalnya saja data BLT, nanti bakalan ketahuan siapa masyarakat yang memalsukan data”<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas, terungkap strategi yang diterapkan untuk menangani potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Nagari Berbasis Data Presisi. Pendekatan utama yang diambil adalah komunikasi langsung dengan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk Meminimalkan risiko kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data dan Memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini berupaya meningkatkan akurasi data dan efektivitas implementasinya.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

Dalam pelaksanaan program Nagari Data Presisi di Nagari Panampuang masih ditemukan kendala. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Panampuang:

“Kendala yang pertama yaitu masih adanya masyarakat Nagari Panampuang yang ragu dalam mengasih data dikarenakan perbedaan pandangan partai politik, dalam mengatasi hal itu pihak nagari melakukan pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan, kemudian sumber daya yang sedikit melakukan pergantian dalam petugas enumerator pendataan nagari. Untuk mengatasi peningkatan sumber daya manusia kita melakukan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan Aplikasi Merdesa kepada kader”<sup>26</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh kader Nagari Berbasis Data Presisi, sebagai berikut:

“Dari pihak IPB mendapatkan pelatihan dalam menggunakan aplikasi merdesa, kami belum mengerti dalam menggunakan aplikasi secara mendalam, untuk solusinya kami dilatih dalam menggunakan aplikasi Merdesa Sensus sebanyak 10 kali yang dilakukan oleh pihak FEMA Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengetahui cara menggunakan aplikasi Merdesa Sensus”<sup>27</sup>

Wawancara mengungkapkan bahwa Nagari Panampuang di Kecamatan Ampek Angkek, beserta pihak-pihak terkait, telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul. Salah satu solusi utama yang diterapkan adalah penyelenggaraan pelatihan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Pada 21/05/2024 pada pukul 09.30 WIB

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Yulia Kader Nagari Berbasis Data Presisi Nagari Panampuang. Pada 23/05/2024 pada pukul 11.00-12.00 WIB

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap program yang direncanakan pasti menghadapi permasalahan, baik selama pelaksanaan maupun setelahnya. Hal ini juga berlaku bagi Nagari Panampuang, yang telah dipilih sebagai *pilot project* untuk program Nagari Berbasis Data Presisi di Sumatera Barat. Mengingat peran penting Nagari Panampuang sebagai *pilot project*, maka penerapan manajemen yang efektif menjadi kunci utama. Manajemen yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, sehingga tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan optimal. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kualitas manajemen yang baik dalam menjamin keberhasilan Program Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang dan potensi penerapannya di nagari lain. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Manajemen Program Perencanaan Pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Program Perencanaan Pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

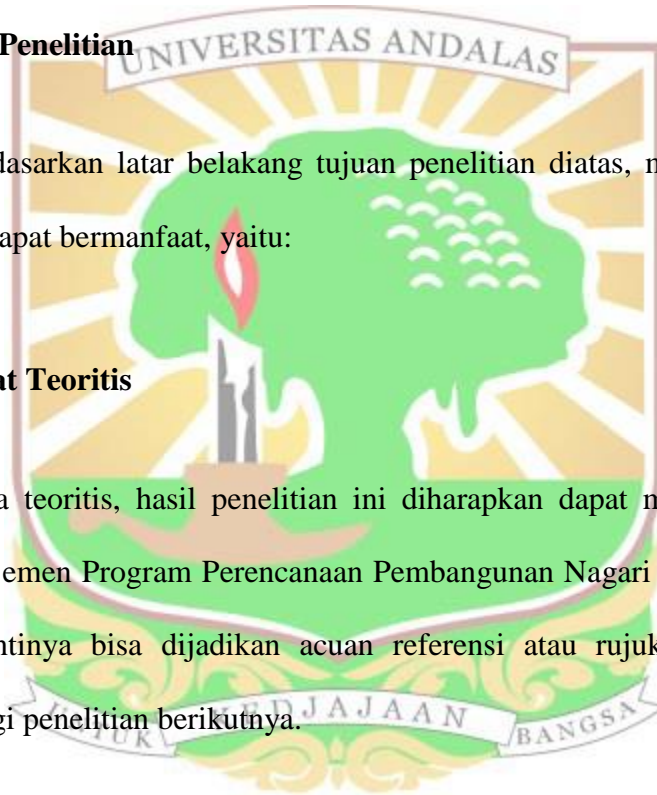
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Manajemen Program Perencanaan Pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat, yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait Manajemen Program Perencanaan Pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi, sehingga nantinya bisa dijadikan acuan referensi atau rujukan tentang data dan informasi bagi penelitian berikutnya.



### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Nagari Panampuang di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam untuk meningkatkan penerapan teknologi dalam pengelolaan data, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

